



BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA OHOI
SETIAP OHOI KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bupati menetapkan rincian Alokasi Dana Ohoi untuk setiap Ohoi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Ohoi Setiap Ohoi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 3);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Ohoi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratshap dan Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 03 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA OHOI SETIAP OHOI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Alokasi Dana Ohoi adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Jumlah Ohoi adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi selanjutnya disebut APBOhoi adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Ohoi.
8. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
9. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening Kas Ohoi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan rincian Alokasi Dana Ohoi untuk setiap Ohoi di Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Rincian Alokasi Dana Ohoi untuk setiap Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan secara merata dan berkeadilan, berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar, alokasi dasar per Ohoi dihitung sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Ohoi pada APBD dibagi jumlah Ohoi; dan
- b. Alokasi Formula, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis Ohoi yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Penghitungan Alokasi Formula setiap Ohoi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)] \times (DD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})$$

Keterangan:

- W = Alokasi Dana Ohoi setiap Ohoi yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis ohoi setiap kabupaten/kota.
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Ohoi terhadap total penduduk Ohoi nasional.

- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Ohoi terhadap total penduduk miskin Ohoi nasional.
- Z3 = Rasio luas wilayah ohoi setiap Ohoi terhadap total penduduk miskin Ohoi nasional.
- Z4 = Rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang memiliki Ohoi.
- DDkab/kota = Pagu Alokasi Dana Ohoi kabupaten/kota.
- ADkab/kota = Besaran Alokasi Dana untuk setiap Ohoi dikalikan jumlah Ohoi dalam kabupaten/kota.

Pasal 5

Alokasi Dana Ohoi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 bersifat dinamis, yang artinya disesuaikan dengan Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak yang diterima Daerah.

Pasal 6

- (1) Indeks kesulitan geografis Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Jika indeks kesulitan geografis Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan oleh Bupati, maka indeks kesulitan geografis Ohoi menggunakan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Ohoi dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Ohoi Tahap I dilakukan setelah Kepala Ohoi menyampaikan:
 - a. Peraturan Ohoi mengenai APBOhoi dan Peraturan Kepala Ohoi mengenai Penjabaran APBOhoi.
 - b. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Peraturan Ohoi dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Ohoi Tahap II dilakukan setelah Kepala Ohoi menyampaikan:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi Tahap I.
 - b. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Ohoi Tahap I telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
 - c. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juni.

- (6) Penyaluran Alokasi Dana Ohoi Tahap III dilakukan setelah Kepala Ohoi menyampaikan:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi Tahap II.
 - b. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi Tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Ohoi Tahap II telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
 - c. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi Tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf (a) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7) Rincian Alokasi Dana Ohoi yang diterima Ohoi setiap tahun dianggarkan dalam APBOhoi.

Pasal 8

Alokasi Dana Ohoi diprioritaskan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan dan bidang pembinaan kemasyarakatan desa sesuai prioritas yang ditetapkan Bupati.

Pasal 9

Pengelolaan keuangan Ohoi dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 10

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBOhoi harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Jur Tulis atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBOhoi tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBOhoi ditetapkan menjadi Peraturan Ohoi.
- (4) Bendahara Ohoi sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Ohoi dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi Tahap I dan laporan realisasi Penggunaan Alokasi Dana Ohoi tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I 20% (dua puluh persen) paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II 40% (empat puluh persen) paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan; dan
 - c. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi tahunan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Ohoi dalam hal Kepala Ohoi tidak menyampaikan APBOhoi dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBOhoi dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Bupati mengurangi penyaluran Alokasi Dana Ohoi dalam hal ditemukan penyerapan anggaran yang terlambat pada setiap tahap.
- (4) SiLPA Alokasi Dana Ohoi yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Alokasi Dana Ohoi yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Alokasi Dana Ohoi yang diterima Ohoi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Ttd.

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Ttd.

MATHEOS TESLATU

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Bagian Hukum

DEBBIE P. J. BUNGA, SH
PENATA TK.I III/d
NIP. 19781220 200804 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TANGGAL 3 JANUARI 2019

NO.	NAMA KECAMATAN / OHOI	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	KECAMATAN KEI KECIL	3,884,963,265.00	523,921,905.77	4,408,879,200.00
1	LANGGUR	242,810,204.06	102,122,521.73	344,925,200.00
2	WATDEK	242,810,204.06	35,394,600.60	278,205,000.00
3	OHOIJANG	242,810,204.06	40,824,982.67	283,635,000.00
4	FAAN	242,810,204.06	32,655,002.58	275,465,000.00
5	SATHEAN	242,810,204.06	41,575,949.63	284,386,000.00
6	IBRA	242,810,204.06	41,996,090.33	284,806,000.00
7	NGABUB	242,810,204.06	23,718,428.42	266,529,000.00
8	OHOIDERTAWUN	242,810,204.06	28,309,700.72	271,120,000.00
9	KELANIT	242,810,204.06	18,809,909.81	261,620,000.00
10	KOLSER	242,810,204.06	47,407,395.86	290,218,000.00
11	LETMAN	242,810,204.06	21,008,662.66	263,819,000.00
12	WEARLILIR	242,810,204.06	22,175,977.06	264,986,000.00
13	OHOIDER ATAS	242,810,204.06	9,202,585.79	252,013,000.00
14	DUDUNWAHAN	242,810,204.06	35,291,371.55	278,102,000.00
15	LOON	242,810,204.06	12,611,365.29	255,422,000.00
16	SITNIOHOI	242,810,204.06	10,817,361.06	253,628,000.00
II	KECAMATAN KEI BESAR	8,983,977,550.31	952,728,617.86	9,936,709,000.00
17	WERKA	242,810,204.06	45,268,420.37	288,079,000.00
18	WAUR	242,810,204.06	18,958,813.96	261,769,000.00
19	OHOINANGAN	242,810,204.06	44,204,916.12	287,015,000.00
20	LER OHOILIM	242,810,204.06	52,561,720.06	295,372,000.00
21	RAHARENG	242,810,204.06	17,769,502.15	260,580,000.00
22	ELAT	242,810,204.06	19,723,999.20	262,534,000.00
23	DEPUR	242,810,204.06	18,029,300.07	260,840,000.00
24	OHOILIM	242,810,204.06	15,387,920.62	258,198,000.00
25	EL RALANG	242,810,204.06	27,332,572.47	270,143,000.00
26	REYAMRU	242,810,204.06	34,078,104.45	276,888,000.00
27	FAKO	242,810,204.06	57,017,419.64	299,828,000.00
28	YAMTEL	242,810,204.06	67,625,656.72	310,436,000.00
29	WAUR TAHIT	242,810,204.06	30,173,967.41	272,984,000.00
30	NGEFUIT	242,810,204.06	16,506,340.65	259,317,000.00
31	OHOIEL	242,810,204.06	72,015,800.31	314,826,000.00
32	OHOIWAIT	242,810,204.06	23,852,268.57	266,662,000.00
33	OHOIWANG	242,810,204.06	14,548,590.37	257,359,000.00
34	FANGAMAS	242,810,204.06	15,149,211.87	257,959,000.00
35	OHOINANGAN ATAS	242,810,204.06	17,542,859.94	260,353,000.00
36	HARANGUR	242,810,204.06	10,480,744.77	253,291,000.00
37	UDAR	242,810,204.06	10,886,622.96	253,697,000.00
38	DAFTEL	242,810,204.06	15,271,362.20	258,082,000.00
39	KARKARIT	242,810,204.06	13,888,283.08	256,698,000.00
40	RAHARENG ATAS	242,810,204.06	18,162,463.82	260,973,000.00
41	WULURAT	242,810,204.06	17,579,268.58	260,389,000.00
42	WAKOL	242,810,204.06	13,605,105.06	256,415,000.00
43	NGURDU	242,810,204.06	15,976,669.70	258,787,000.00
44	SOINRAT	242,810,204.06	16,090,443.17	258,901,000.00
45	WERMAF	242,810,204.06	15,899,612.24	258,710,000.00
46	BOMBAY	242,810,204.06	25,305,527.64	268,116,000.00
47	WATSIN	242,810,204.06	37,582,856.93	280,393,000.00
48	SIRBANTE	242,810,204.06	20,344,523.25	263,155,000.00
49	NGAT	242,810,204.06	16,940,434.21	259,751,000.00
50	NABAHENG	242,810,204.06	16,576,615.15	259,387,000.00
51	NGEFUIT ATAS	242,810,204.06	36,599,441.29	279,410,000.00
52	WATUAR	242,810,204.06	22,323,560.04	265,134,000.00
53	MATAHOLAT	242,810,204.06	21,467,698.80	264,278,000.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
III	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN	2,428,102,040.63	323,687,544.22	2,751,791,000.00
54	WEDUAR	242,810,204.06	24,625,403.48	267,436,000.00
55	NERONG	242,810,204.06	41,937,427.13	284,748,000.00
56	LARAT	242,810,204.06	16,608,659.09	259,419,000.00
57	TAMANGIL NUHUTEN	242,810,204.06	23,192,966.87	266,003,000.00
58	TAMANGIL NUHUYANAT	242,810,204.06	17,141,341.43	259,952,000.00
59	KILWAT	242,810,204.06	32,026,939.26	274,837,000.00
60	SATHER	242,810,204.06	75,657,109.64	318,467,000.00
61	TUTREAN	242,810,204.06	27,337,788.98	270,148,000.00
62	OHOIRENAN	242,810,204.06	44,439,329.62	287,250,000.00
63	SOINDAT	242,810,204.06	20,720,578.71	263,531,000.00
IV	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR	7,284,306,121.88	972,301,158.76	8,256,608,000.00
64	HOLLAT	242,810,204.06	67,631,551.08	310,442,000.00
65	OHOIRAUT	242,810,204.06	21,784,987.02	264,595,000.00
66	HAAR OHOIMEL	242,810,204.06	24,980,829.90	267,791,000.00
67	LANGGIAR HAAR	242,810,204.06	25,639,029.81	268,449,000.00
68	BANDA ELI	242,810,204.06	21,100,426.62	263,911,000.00
69	WATLAAR	242,810,204.06	35,062,704.23	277,873,000.00
70	OHOIFAU	242,810,204.06	32,696,273.92	275,506,000.00
71	KILWAIR	242,810,204.06	39,607,282.84	282,417,000.00
72	RENFAAN	242,810,204.06	35,736,094.40	278,546,000.00
73	HOLLAT SOLAIR	242,810,204.06	40,338,058.59	283,148,000.00
74	HOKO	242,810,204.06	28,430,057.86	271,240,000.00
75	HOLLAY	242,810,204.06	30,836,680.70	273,647,000.00
76	SOIN	242,810,204.06	15,612,426.70	258,423,000.00
77	HAAR OHOIMUR GPM	242,810,204.06	29,852,908.90	272,663,000.00
78	HAAR OHOIMUR RK	242,810,204.06	23,062,687.60	265,873,000.00
79	HAAR OHOIWAIT	242,810,204.06	15,525,725.21	258,336,000.00
80	HAAR WASSAR	242,810,204.06	50,413,356.60	293,224,000.00
81	HAAR RENRAHANTEL	242,810,204.06	18,644,812.43	261,455,000.00
82	UR	242,810,204.06	20,231,957.69	263,042,000.00
83	OHOIMAJANG	242,810,204.06	20,928,734.37	263,739,000.00
84	BANDA EFRUAN	242,810,204.06	71,340,147.90	314,150,000.00
85	BANDA SUKU TIGAPULUH	242,810,204.06	45,240,445.05	288,051,000.00
86	TUBURLAY	242,810,204.06	25,228,746.25	268,039,000.00
87	OHOIFARUAN	242,810,204.06	23,614,557.43	266,425,000.00
88	OHOIWIRIN	242,810,204.06	52,188,576.12	294,999,000.00
89	TUBURNGIL	242,810,204.06	28,367,786.78	271,178,000.00
90	YAMTIMUR	242,810,204.06	54,626,751.69	297,437,000.00
91	RENFAAN ISLAM	242,810,204.06	23,507,366.19	266,318,000.00
92	RENFAAN GPM	242,810,204.06	22,675,789.15	265,486,000.00
93	FANWAV	242,810,204.06	27,394,405.75	270,205,000.00
V	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR	4,370,583,673.13	346,791,034.81	4,717,376,000.00
94	WAIN	242,810,204.06	32,517,444.67	275,328,000.00
95	REVAV	242,810,204.06	33,784,038.20	276,594,000.00
96	RUMAAT	242,810,204.06	13,561,894.69	256,372,000.00
97	RAT	242,810,204.06	15,591,149.29	258,401,000.00
98	ABEAN	242,810,204.06	38,238,871.52	281,049,000.00
99	MASTUR	242,810,204.06	18,583,707.12	261,394,000.00
100	OHOINOL	242,810,204.06	27,352,511.26	270,163,000.00
101	SEMAWI	242,810,204.06	17,373,524.49	260,184,000.00
102	ISO	242,810,204.06	13,562,343.53	256,373,000.00
103	DISUK	242,810,204.06	12,644,410.56	255,455,000.00
104	WAIN BARU	242,810,204.06	12,558,952.87	255,369,000.00
105	MARFUN	242,810,204.06	12,382,394.03	255,193,000.00
106	WATNGON	242,810,204.06	11,677,609.64	254,488,000.00
107	YAFAVUN	242,810,204.06	12,828,148.01	255,638,000.00
108	MASTUR BARU	242,810,204.06	20,126,839.96	262,937,000.00
109	OHOILUS	242,810,204.06	25,514,319.45	268,325,000.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
110	TENBUK	242,810,204.06	12,725,219.89	255,535,000.00
111	DENWET	242,810,204.06	15,767,655.61	258,578,000.00
VI	KECAMATAN KEI KECIL BARAT	2,428,102,040.63	263,904,101.01	2,692,007,000.00
112	OHOIDERTUTU	242,810,204.06	51,096,661.93	293,907,000.00
113	MATWAI	242,810,204.06	20,397,594.82	263,208,000.00
114	SOMLAIN	242,810,204.06	18,359,996.51	261,170,000.00
115	OHOIREN	242,810,204.06	29,480,979.85	272,291,000.00
116	OHOIRA	242,810,204.06	29,852,328.25	272,663,000.00
117	WARBAL	242,810,204.06	25,826,119.31	268,636,000.00
118	UR PULAU	242,810,204.06	30,828,509.41	273,639,000.00
119	TANIMBAR KEI	242,810,204.06	22,903,471.39	265,714,000.00
120	OHOIDERTOM	242,810,204.06	18,667,904.00	261,478,000.00
121	YATWAV	242,810,204.06	16,490,535.54	259,301,000.00
VII	KECAMATAN MANYEUW	2,185,291,836.56	147,222,222.18	2,332,514,000.00
122	RUMADIAN	242,810,204.06	22,280,065.39	265,090,000.00
123	DEBUT	242,810,204.06	31,684,500.60	274,495,000.00
124	NAMAR	242,810,204.06	14,329,429.89	257,140,000.00
125	NGILNGOF	242,810,204.06	16,179,549.54	258,990,000.00
126	SELAYAR	242,810,204.06	9,495,277.62	252,305,000.00
127	LAIRNGANGAS	242,810,204.06	12,495,807.16	255,306,000.00
128	OHOILUK	242,810,204.06	8,048,720.97	250,859,000.00
129	OHOILILIR	242,810,204.06	18,349,036.31	261,159,000.00
130	NGAYUB	242,810,204.06	14,359,834.71	257,170,000.00
VIII	KECAMATAN HOAT SORBAY	3,156,532,652.81	343,099,562.04	3,499,633,000.00
131	TETOAT	242,810,204.06	15,460,486.87	258,271,000.00
132	DIAN PULAU	242,810,204.06	15,913,067.91	258,723,000.00
133	LETVUAN	242,810,204.06	53,585,029.19	296,395,000.00
134	EVU	242,810,204.06	26,142,363.61	268,953,000.00
135	WARWUT	242,810,204.06	26,666,036.51	269,476,000.00
136	WAB	242,810,204.06	73,749,274.90	316,559,000.00
137	DIAN DARAT	242,810,204.06	50,457,440.43	293,268,000.00
138	WIRIN	242,810,204.06	13,848,705.05	256,659,000.00
139	NGURSIT	242,810,204.06	9,254,373.97	252,065,000.00
140	MADWAT	242,810,204.06	16,580,531.68	259,391,000.00
141	OHOIBADAR	242,810,204.06	13,663,657.84	256,474,000.00
142	WATNGIL	242,810,204.06	20,651,856.40	263,462,000.00
143	ARSO	242,810,204.06	7,126,737.69	249,937,000.00
IX	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT	6,070,255,101.56	852,060,622.21	6,922,313,000.00
144	WEER OHOINAM	242,810,204.06	21,197,270.57	264,007,000.00
145	WEER OHOIKER	242,810,204.06	17,644,135.91	260,454,000.00
146	WEER FRAWAF	242,810,204.06	28,168,093.51	270,978,000.00
147	FAA	242,810,204.06	20,307,315.85	263,118,000.00
148	DANGARAT	242,810,204.06	27,858,113.46	270,668,000.00
149	OHOITUF	242,810,204.06	24,777,395.72	267,588,000.00
150	HANGUR	242,810,204.06	38,067,013.29	280,877,000.00
151	NGURWALEK	242,810,204.06	22,011,313.92	264,822,000.00
152	UWAT	242,810,204.06	85,800,102.80	328,610,000.00
153	UWAT WEAR	242,810,204.06	14,050,848.11	256,861,000.00
154	UWAT REYAAN	242,810,204.06	21,100,389.59	263,911,000.00
155	MUN OHOIIR	242,810,204.06	98,279,287.53	341,089,000.00
156	MUN ESSOY	242,810,204.06	20,307,004.04	263,117,000.00
157	MUN KAHAR	242,810,204.06	16,863,585.99	259,674,000.00
158	MUN NGURDITWAIN	242,810,204.06	22,090,028.76	264,900,000.00
159	MUN WERFAN	242,810,204.06	21,684,826.98	264,495,000.00
160	AD NGURWUL	242,810,204.06	59,093,118.75	301,903,000.00
161	AD OHOIWAF	242,810,204.06	31,937,068.31	274,747,000.00
162	LAAR	242,810,204.06	31,961,070.34	274,771,000.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
163	HOOR ISLAM	242,810,204.06	34,636,959.82	277,447,000.00
164	HOOR KRISTEN	242,810,204.06	26,227,080.63	269,037,000.00
165	WAER	242,810,204.06	47,817,848.64	290,628,000.00
166	WAERAT	242,810,204.06	16,005,151.66	258,815,000.00
167	MUN OHOITADIUN	242,810,204.06	39,974,573.65	282,785,000.00
168	AD WEAR AUR	242,810,204.06	64,201,024.37	307,011,000.00
X	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT	3,156,532,652.81	256,753,713.61	3,413,287,000.00
169	HOAT	242,810,204.06	19,588,168.20	262,398,000.00
170	NGAFAN	242,810,204.06	37,859,869.79	280,670,000.00
171	FEER	242,810,204.06	17,946,241.89	260,756,000.00
172	REREAN	242,810,204.06	17,892,625.28	260,703,000.00
173	NGURKO	242,810,204.06	11,778,656.42	254,589,000.00
174	HOKO	242,810,204.06	23,627,447.04	266,438,000.00
175	WEDUAR FER	242,810,204.06	13,789,426.57	256,600,000.00
176	UAT	242,810,204.06	16,225,042.77	259,035,000.00
177	NGAN	242,810,204.06	13,281,562.63	256,092,000.00
178	WATKIDAT	242,810,204.06	24,244,919.04	267,055,000.00
179	OHOILEAN	242,810,204.06	15,585,039.23	258,395,000.00
180	WAFOL	242,810,204.06	23,104,343.75	265,915,000.00
181	RAHANGIAR	242,810,204.06	21,830,371.01	264,641,000.00
XI	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN	2,670,912,244.69	197,480,537.52	2,868,393,000.00
182	DANAR OHOISEB	242,810,204.06	12,779,992.76	255,590,000.00
183	DANAR TERNATE	242,810,204.06	31,702,588.56	274,513,000.00
184	DANAR LUMEFAR	242,810,204.06	24,713,933.93	267,524,000.00
185	ELAAR NGURSOIN	242,810,204.06	13,613,002.21	256,423,000.00
186	ELAAR LAMAGORANG	242,810,204.06	14,159,465.08	256,970,000.00
187	ELAAR LET	242,810,204.06	14,023,251.92	256,833,000.00
188	SARE	242,810,204.06	13,313,392.62	256,124,000.00
189	MAAR	242,810,204.06	19,888,961.64	262,699,000.00
190	UF	242,810,204.06	17,563,308.12	260,374,000.00
191	NGURWUL	242,810,204.06	15,842,881.50	258,653,000.00
192	GARARA	242,810,204.06	19,879,759.18	262,690,000.00
	TOTAL	46,619,559,180.00	5,179,951,020.00	51,799,510,200.00

KONTROL PENGHITUNGAN	
	(Rp.)
PAGU ALOKASI DANA OHOI KABUPATEN	51,799,510,200.00
HASIL PERHITUNGAN PAGU DANA DESA KABUPATEN	51,799,510,200.00
PAGU ALOKASI DASAR	46,619,559,180.00
PAGU BAGIAN FORMULA	5,179,951,020.00
JUMLAH DESA	192.00

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Ttd.

MUHAMAD THAHER HANUBUN